

Tinjauan Mata Kuliah

Matakuliah IPEM4431/Manajemen Pemerintahan merupakan mata kuliah pokok dan salah satu mata kuliah pendukung tugas akhir program (TAP) dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang terkelompok dalam kompetensi menganalisis manajemen pemerintahan. Kompetensi menganalisis manajemen pemerintahan merupakan salah satu kompetensi khusus yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan dari lulusan program studi Ilmu Pemerintahan UT yaitu mampu menganalisis masalah-masalah masyarakat yang berkembang dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu, modul ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa dan siapa saja yang berniat untuk menganalisis manajemen pemerintahan mulai dari manajemen organisasi pemerintahan pusat sampai organisasi pemerintahan desa.

Modul manajemen pemerintahan membahas tentang hubungan antara administrasi, organisasi dan manajemen, teori organisasi neo-klasik, pandangan modern dan pascamodern (pendekatan sistem, kontingensi dan teori Form organisasi), penyusunan organisasi formal, fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi pemerintahan, manajemen kinerja pemerintahan, manajemen pemerintahan: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa, pengukuran efektivitas organisasi pemerintahan, dan model organisasi dan manajemen negara maju (Jepang dan Amerika).

Pada edisi baru ini telah dilakukan perombakan total dari seluruh modul dari edisi pertama dengan bantuan suatu tim ahli materi. Hasilnya adalah sebagai berikut.

Modul 1 : membahas tentang hubungan antara administrasi, organisasi dan manajemen serta tujuan organisasi.

Modul 2 : membahas tentang teori organisasi Neo-Klasik, yang mencakup pokok bahasan pendekatan teori Neo-Klasik, dinamika kelompok dalam organisasi, dan konflik kelompok.

Modul 3: membahas tentang pandangan modern dan pasca modern tentang organisasi, yang mencakup pokok bahasan penyumbang pemikiran terhadap pendekatan sistem dan kontingensi, lingkungan organisasi, tingkah laku individu dan motivasinya, pendekatan sistem, kontingensi dan *T-Form*.

- Modul 4 : membahas tentang penyusunan organisasi formal, yang mencakup pokok bahasan pengorganisasian, pendelegasian wewenang, dan rentang pengawasan.
- Modul 5 : membahas tentang fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi pemerintahan, yang mencakup pokok bahasan pengertian dan fungsi manajemen, perencanaan dan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan organisasi pemerintahan.
- Modul 6 : membahas tentang manajemen kinerja pemerintahan, yang mencakup pokok bahasan manajemen kinerja pada organisasi publik dan manajemen publik baru (*new public management*).
- Modul 7 : membahas tentang manajemen pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan desa dalam rangka otonomi daerah, yang mencakup pokok bahasan manajemen pemerintahan pusat, manajemen pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota), manajemen pemerintahan kecamatan, dan manajemen pemerintahan desa.
- Modul 8 : membahas tentang pengukuran efektivitas organisasi pemerintahan, yang mencakup pokok bahasan teknik pengukuran efektivitas organisasi pemerintah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
- Modul 9 : membahas tentang organisasi dan manajemen negara maju, yang mencakup pokok bahasan latar belakang organisasi dan manajemen Jepang, perbandingan manajemen Jepang dan Amerika, serta teori Z.

Perlu diperhatikan oleh para mahasiswa bahwa pada modul tujuh dan modul delapan terdapat materi yang sarat dan terkait dengan peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal materi yang menyangkut tentang pengatur/manajemen desa, kelurahan dan kecamatan serta fungsi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Materi ini bisa saja berubah atau disempurnakan seiring dengan terjadinya reformasi dalam manajemen pemerintahan atau penyempurnaan organisasi dan manajemen pemerintahan. Atas dasar hal tersebut, jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut materi yang mengkaji hal relevan dengan materi pada modul tujuh dan delapan, maka mahasiswa diwajibkan mempelajari materi perundang-undangan tersebut karena materi ini dalam peraturan perundang-undangan tersebut seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan akan menjadi bagian dan diujikan dalam Tugas Akhir Program (TAP) maupun Ujian Akhir Semester (UAS).

Untuk memudahkan mahasiswa dan siapa saja yang berniat mempelajari mata kuliah ini, dalam memahami isi modul sebaiknya mempelajari Modul 1 sampai Modul 9 dengan memperhatikan skema analisis instruksional berikut ini.

**Analisis Instruksional Mata Kuliah
IPEM 4431/Manajemen Pemerintahan**

